

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimarannu 2025 telah dapat kami Selesaikan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dari tugas-tugas yang telah kami laksanakan pada Tahun Anggaran 2025, dalam laporan ini menjelaskan keberhasilan-keberhasilan yang telah kami capai serta kendala-kendala dan hambatan serta solusi yang kami tawarkan kepada Pemerintah Daerah guna kesempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kami menyadari, laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap dengan laporan ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Selayar maupun masyarakat dan mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Laporan ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pasimarannu maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Bonerate, 31 Desember 2025
CAMAT PASIMARANNU,

SYAMSIL, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. 1, IV/b

NIP : 19680204 198903 1 009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum OPD
(Sekurang-kurangnya memuat Tipe Kantor, Alamat, Email, Titik Koordinat dan Foto Kantor)
- 1.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;
- 1.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
 - 2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan
 - 2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
 - 2.1.5. Inovasi
 - 2.1.6. Prestasi/ Penghargaan
2. 2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan
- 3.2. Hambatan - Hambatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menggunakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian lokal serta untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah berdasarkan sumber daya yang ada serta tetap dikonstruksikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu rangkaian dari bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas-tugas Kecamatan yang merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimana Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan. Kewenangan tersebut berupa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan itu sendiri. Perubahan fungsi kecamatan memungkinkan dilaksanakannya beberapa kegiatan yang sifatnya lintas sektor sebagai perpanjangan jalur koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 telah banyak memberikan perkembangan yang cukup signifikan namun bukan berarti kegiatan yang dilaksanakan tidak berlanjut lagi. Hasil yang telah diperoleh diharapkan ada peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis kecamatan sebagai tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kecamatan Pasimarannu menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Bupati dengan memperhatikan kondisi wilayah dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam Wilayah Kecamatan.

1.1. Gambaran Umum OPD

Gambar 1
Kantor Kecamatan Pasimarannu



Pasimarannu adalah salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasimarannu berjarak sekitar 119 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut \pm 12 Jam. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasimarannu dilaksanakan di Kantor Kecamatan yang bearalamat di Jln. Majapahit No. 356 Bonerate Kode Pos 92862 (email : kecamatanpasimarannubonerate@gmail.com). Titik Koordinat Kantor Kecamatan Pasimarannu : **-7.359951,121.086003**. Kecamatan

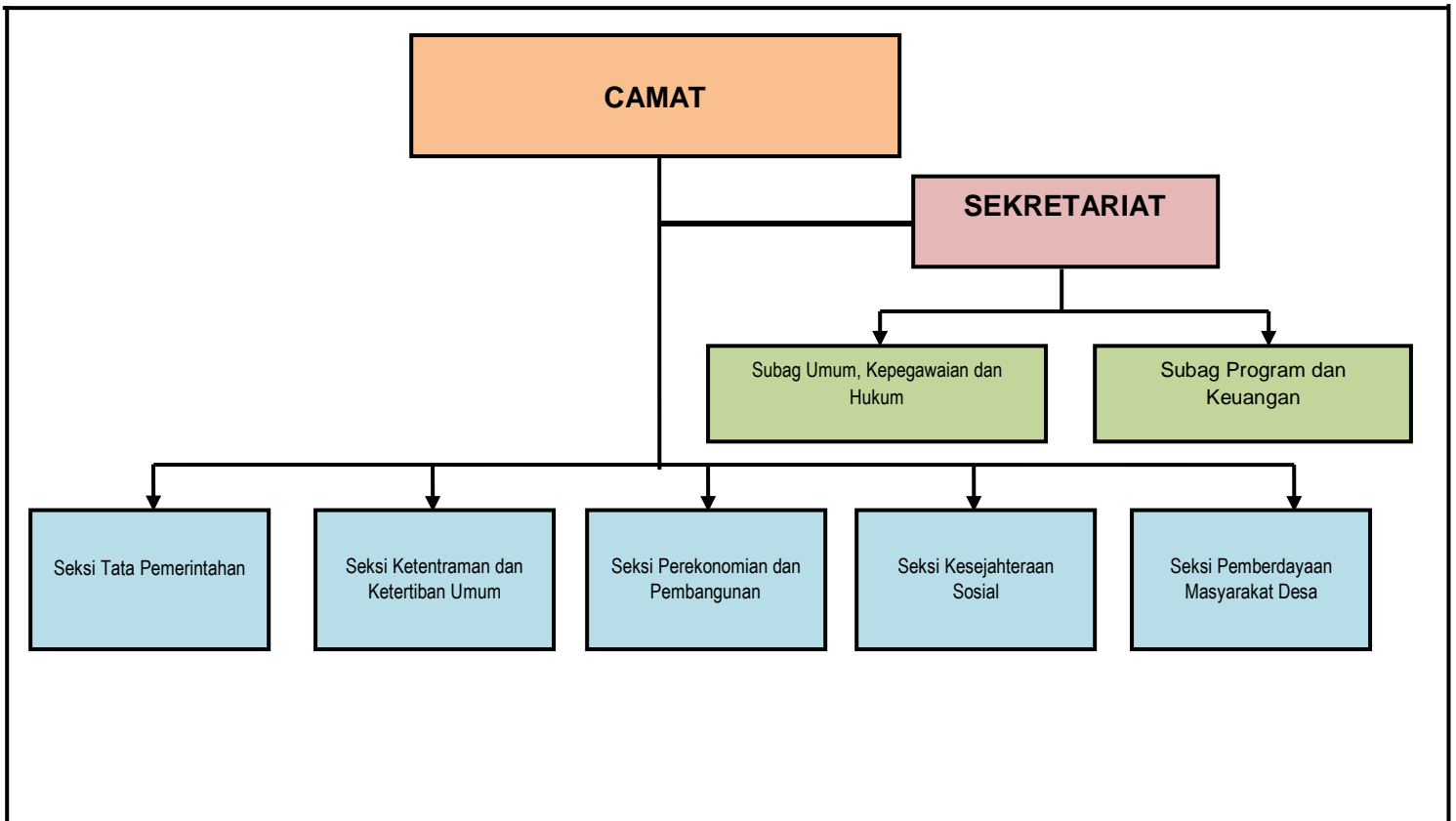
Pasimarannu terdiri dari 8 (delapan) Desa dan 26 (dua puluh enam) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut, yaitu :

No.	Desa	Jml KK	Lk	Pr	Jml
1.	Bonerate	456	707	707	1.414
2.	Majapahit	770	1.120	1.279	2.399
3.	Lamantu	449	748	815	1.563
4.	Batu Bingkung	454	714	712	1.426
5.	Bonea	372	498	591	1.089
6.	Sambali	364	602	622	1.224
7.	Lambego	287	464	524	988
8.	Komba-Komba	196	354	331	685
Jumlah		3.348	5.207	5.581	10.788

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimarannu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun susunan Organisasi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Pasimarannu



Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, dijelaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (pasal 4). Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut, kecamatan sebagaimana diuraikan pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi :

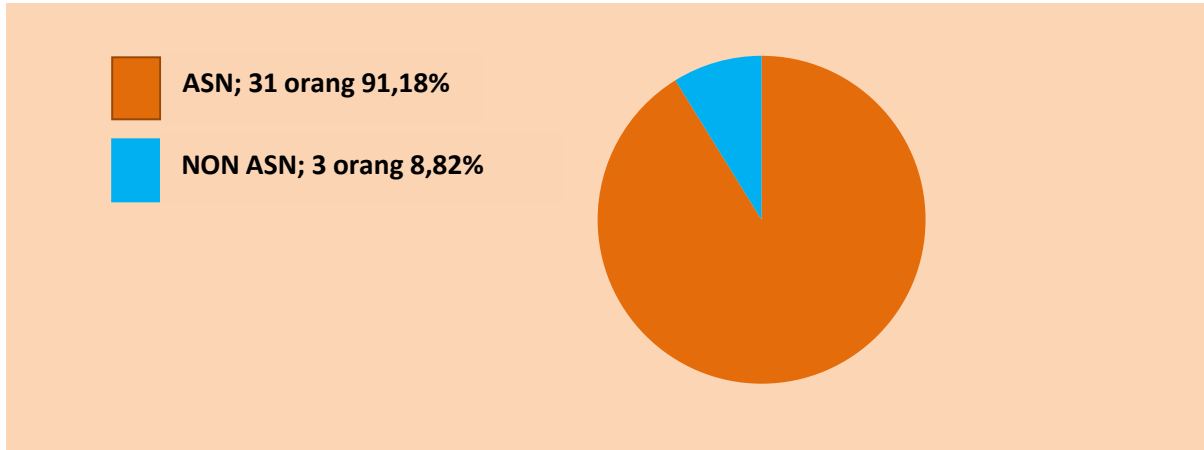
- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Sumber Daya Manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam penulisan ini antara lain jumlah pegawai, tingkat pendidikan dan kepangkatan. Dilihat dari perspektif Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Pasimarannu didukung sumber daya manusia sebanyak 34 orang yang terdiri dari 31 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 Orang berstatus Non ASN.

Gambar 3
Kondisi SDM Kecamatan Pasimarannu
Berdasarkan Status Kepegawaian



Tabel 1
Data Pegawai Kecamatan Pasimarannu
Tahun 2025

NO.	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN
1.	SYAMSIL, S.Sos Pangkat : Pembina Tk. 1, IV/b NIP : 19680204 198903 1 009	CAMAT
2.	SAMSUDDIN, S.T Pangkat : Penata Tk. 1, III/d NIP : 19760218 200003 1 004	SEKRETARIS
3.	ABD. HAMID, A.MK Pangkat : Penata, III/c NIP : 19730110 199403 1 003	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
4.	WIDYA PUSPITA SARI, ST, MM Pangkat : Penata, III/c NIP : 19910226 201503 2 003	KASI TATA PEMERINTAHAN
5.	ZAENAL ARDI, S.T Pangkat : Penata , III/c NIP : 19830520 201407 1 003	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

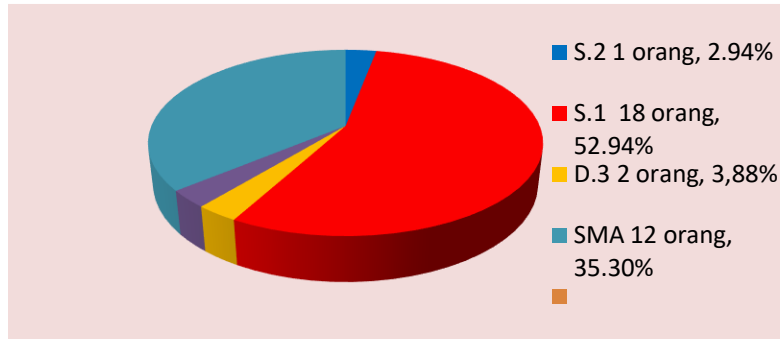
6.	RAIL, SE Pangkat : Penata Muda Tk. 1, III/b NIP : 19750815 200906 1 002	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
7.	SAIFUDDIN, S.Pd Pangkat : Penata Muda, III/a NIP : 19730516 201407 1 003	KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
8.	BAHTIAR, A.Md Pangkat : Penata Muda, III/a NIP : 19730307 201502 1 001	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
9.	ANDI NUR ISRAYANTI, S.E Pangkat : Penata Muda Tk. 1, III/b NIP : 19841226 201407 2 003	STAF
10.	RATNA SIHADJI Pangkat : Penata Muda, III/a NIP : 19800607 200312 2 009	STAF
11.	BASRI Pangkat : Pengatur, II/d NIP : 19690701 200906 1 006	STAF
12.	MUH. TAHIR, P. Pangkat : Pengatur Muda Tk. I, II/b NIP : 19711021 200701 1 021	STAF
13.	ROSDALINA Pangkat : Pengatur Muda Tk.1, II/b NIP : 19740721 201001 2 002	STAF
14.	NUR LAELA	STAF
15.	SUKMAWAN	STAF
16.	ROSMAWATI, S.Pd	STAF
17.	UCIARNI, S.Pd.I	STAF
18.	ARIFIN ADAM	STAF

19.	ABDULLAH	STAF
20.	HAPSARI	STAF
21.	NURJANNAH	STAF
22.	NURHAYATI	STAF
23.	MULIANA, SE	STAF
24.	FARIDAWATI ASIS, SE	STAF
25.	SITI HAJAR, SE	STAF
26.	MIKIAL, SE	STAF
27.	NUR HIDAYAH, S.Sos	STAF
28.	NORMAN QADDAS, S.Kom	STAF
29.	SALFIANA, S.E	STAF
30.	NUR FITRAH	STAF
31.	MULIATI, A.Ma	STAF
32.	HIJRIANTI, SE	HONORER
33.	HUMAIDA TUZZAHRA, S.Ak	HONORER
34.	HASRAWATI, S.Sos	HONORER

Dari total jumlah SDM tersebut, 1 orang atau 2,94% berpendidikan S.2, 18 orang atau 52,94% berpendidikan S.1, 2 orang atau 5,88% berpendidikan D3, 1 orang atau 2,94% berpendidikan D2 dan 12 orang atau 35,30% berpendidikan SMA.

Gambar 4

Komposisi SDM Kecamatan Pasimarannu Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sementara itu, dari sembilan jabatan struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, 8 (delapan) jabatan struktural yang terisi yaitu Camat, Sekretaris, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. 1 (satu) jabatan lainnya masih lowong hingga saat ini.

Tabel 2

Jumlah Jabatan Struktural Kecamatan Pasimarannu Tahun 2024

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON				JUMLAH	KET.
		III a	IIIb	IVa	IVb		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terisi	1	1	4	2	8	
2.	Lowong	-	-	1	-	1	
Jumlah						9	

Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan harus memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Pasimarannu	Renja Tahun 2025	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	86,22 %			
				Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran			
				Rp. 1.607.803.800,00		Rp. 1.386.180.861,00			
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	99,37 %			
					Rp. 18.203.200,00		Rp. 18.089.000,00		
				a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	99,14 %			
					2 Dokumen		2 Dokumen		
					Rp. 8.248.200,00		Rp. 8.177.000,00		
				b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %	99,57 %			
					2 Dokumen		2 Dokumen		
					Rp. 9.955.000,00		Rp. 9.912.000,00		
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	84,21 %			
					Rp. 1.280.875.000,00		Rp.1.078.661.102,00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 % 12 Bulan	84,21 % 12 Bulan			
					Rp. 1.280.875.000,00	Rp. 1.078.661.102,00			
				3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	99,63 %			
					Rp. 7.820.900,00	Rp. 7.792.000,00			
				a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	99,63 %			
					Rp. 7.820.900,00	Rp. 7.792.000,00			
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	93,14 %			
					Rp. 198.641.500,00	Rp. 185.023.400,00			
				a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 12 Bulan	78,02 % 12 Bulan			
					Rp. 57.122.700,00	Rp. 44.568.500,00			
				b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	98,30 %			
					Rp. 4.953.800,00	Rp. 4.869.900,00			
				c. Penyediaan Bahan Bacaan	100 %	100 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 4.380.000,00	Rp. 4.380.000,00			
				d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	99,25 %			
					Rp. 132.185.000,00	Rp. 131.205.000,00			
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	96,94 %			
					Rp. 87.763.200,00	Rp. 85.080.859,00			
				a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	90,84 %			
					12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 6.360.000,00	Rp. 5.777.659,00			
				b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	97,42 %			
					12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 81.403.200,00	Rp. 79.303.200,00			
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	79,55 %			
					Rp. 14.500.000,00	Rp. 11.534.500,00			
				a. Penyediaan Jasa	100 %	79,55 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan			
					Rp. 14.500.000,00	Rp. 11.534.500,00			
				II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	82,11 %			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			
					Rp. 128.338.700,00	Rp. 105.390.241,00			
				1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	82,11 %			
					Rp. 128.338.700,00	Rp. 105.390.241,00			
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	84,65 %			
					Rp. 24.750.000,00	Rp. 20.950.000,00			
				b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	81,51%			
					Rp. 103.588.700,00	Rp. 84.440.241,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				III. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			
					Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00			
				1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	100 %	100 %			
					Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00			
				a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	100 %	100 %			
					Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Kewilayahan					
	Kecamatan Pasimarannu					
	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	%	100	75	75	
	2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	%	100	92	92	
	3. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	%	100	86	86	

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Kewilayahan								
.	Kecamatan Pasimarannu	Rp. 1.748.142.500,-	Rp. 1.503.571.102,-	Rp. 244.571.398,-	86,00	3	89,44	9	91,87

2.1.5. Inovasi

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1				
2				

2.1.6. Prestasi/Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasiona I	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1.	Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	Pemerintah kecamatan akan meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Instansi Vertikal	Terwujudnya keselarasan kebutuhan atau aspirasi pemerintah Desa/Kecamatan dengan program dan kegiatan OPD
2.	Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat	Meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Pengurusan pelayanan yang ramah dan lebih cepat
3.	Menjaga Stabilitas, keamanan, ketertiban dan kebersihan di wilayah kecamatan	Pemerintah Kecamatan akan meningkatkan koordinasi dengan Forkopicam dan Pemerintah desa	Terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan
4.	Mengkoordinasikan Penagihan PBB-P2 di wilayah Kecamatan	Pemerintah Kecamatan melakukan edukasi tentang pentingnya pembayaran PBB di tiap Pemerintah Desa.	Adanya kesadaran Masyarakat dalam hal pembayaran PBB yang tepat waktu

BAB III
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN**

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan
Kecamatan Pasimarannu tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.

3.2. Hambatan – Hambatan
Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Solusi

Dukungan APBD 2025 yang ada dimanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna demi mencapai target organisasi yang diharapkan. Aktifitas pemerintahan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pembangunan daerah. Melalui pendekatan kebutuhan diharapkan APBD pada tahun berikutnya lebih dapat mengakomodasi keperluan kewilayahan.

Secara umum solusi yang dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan Dukungan Sumber Daya Manusia;
2. Mengefektifkan fasilitas yang tersedia guna menyelesaikan program dan kegiatan kecamatan;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya peran wanita dan berusaha menjaga hubungan dengan Tokoh Masyarakat , Agama, Pemuda yang ada di Wilayah Kecamatan Pasimarannu.

BAB IV PENUTUP

Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Pasimarannu telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Laporan ini dibuat secara partisipatif, dengan berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimarannu demi terciptanya tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu ada komunikasi dan kerjasama agar dalam penyelesaian program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dibuat secara kontinyu untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dan terealisasinya dalam setiap program dan kegiatan khususnya di Kecamatan Pasimarannu.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi motifasi untuk mencapai tujuan akhir bersama Amien.

CAMAT PASIMARANNU,

SYAMSIL, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. 1, IV/b

NIP : 19680204 198903 1 009

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)



**KECAMATAN PASIMARANNU
TAHUN 2025**